

**KEHADIRAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DI PERBATASAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE
(RI-RDTL)**

Oleh:

Antik Tri Susanti¹

ABSTRACT

The majority (76%) boundary between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL) is a river. There are rivers upstream and or hilirnya are in the two countries. Water resources will thus be utilized by the two countries. In such situations it is necessary the presence of the State to guarantee the fulfillment of the water in the border region SO. Therefore this research was conducted to determine the presence of the State in the management of water resources in the border region in the 5 aspects: aspects of the conservation of water resources, efficient use of water resources, water damage, power control of information system of water resources (SISDA) and community empowerment. Exploratory qualitative research, carried out in the region of the River (WS) Noelmina in DAS Naekake in the village of Tasinifu, village of Naekake A, in district of North Central Timor Regency Mutis, river basin (WS) Benenain on DAS Alas in the village South-East of Kobalima Sub-district Pedestal District of Malacca, DAS Sarabau Village in Kecamatan Talao Tasifeto Timur Regency of Belu and the village of Asumanu district of Belu, Raihat and DAS Maumutin Raihat Belu District. The results of this research indicate the presence of the State is still very minimal/weak in management of the SDAS in the border region SO-RDTL.

Keywords: *State presence, water resources, water-damaged power facilities, water resource information system, community empowerment, the border region SO-RDTL.*

¹ Staf pengajar Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan perbatasan - mencakup upaya bagaimana mengelola batas wilayah antar negara dan mengelola kawasan perbatasan – dalam jangka panjang, terkait erat dengan visi dan misi pembangunan nasional. Sesuai dengan arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2004-2025, kawasan perbatasan akan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan.

Visi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan: "Terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju." Misi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan: (1) mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut, (2) mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik, serta penegasan dan penetapan tata batas Negara.(3) mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Banyak persoalan yang terkait dengan penerjemahan visi misi wilayah perbatasan tersebut. Satu diantara hal yang penting adalah tentang terpenuhinya kebutuhan air untuk masyarakat perbatasan. Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan di satu pihak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya, di lain pihak ketersediaan sumber daya air semakin terbatas

bahkan cenderung semakin langka. Persolan lain adalah, bagaimana bila sumber daya air tersebut berada di wilayah dua negara.

Sebagian besar (76%) batas antar negara antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) adalah sungai. Ada sungai-sungai yang hulu dan hilirnya berada di dua negara. Air dengan demikian akan dimanfaatkan oleh dua negara. Dalam situasi seperti itu diperlukan kehadiran negara untuk menjamin pemenuhan air di wilayah perbatasan. Apakah negara dalam mengatasi persoalan sumberdaya air di wilayah perbatasan telah hadir menjaga kedaulatannya (ruang yang benar). Sebaliknya bagaimana warga merasakan kehadiran negara, dalam praktek pengalaman hidup dalam mengakses kebutuhan air (kebenaran ruang).

Untuk itulah penelitian ini dilakukan, Bagaimana representasi negara atau kehadiran negara dalam pengelolaan air di wilayah perbatasan RI dan RDTL. Bagaimana kehadiran negara dalam upaya terpenuhinya kecukupan air di wilayah perbatasan RI-RDTL. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggali informasi dan data terkait kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air. Konsep pengelolaan SDA meliputi aspek konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi SDA.

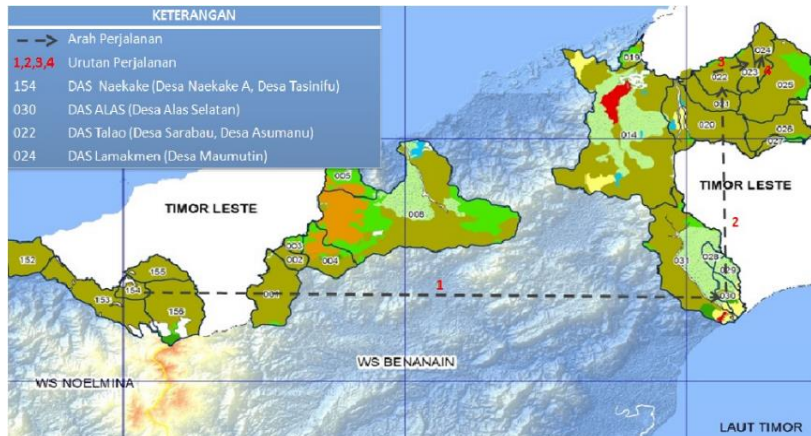
2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan memperoleh dokumen-dokumen dan peta pada staf di instansi pemerintah (Bappeda). Wawancara dengan tokoh masyarakat, kepala desa, kepala adat, masyarakat biasa. Dilakukan juga dengan warga Timor Leste. Wawancara direkam, observasi dibantu dengan kamera. Selama perjalanan, peneliti didampingi oleh pemandu yang mengerti bahasa lokal (bahasa dawang), khususnya membantu wawancara dengan warga lokal yang tidak bisa bahasa Indonesia.

Pengambilan lokasi penelitian, di daerah aliran sungai (DAS) yang berbatasan dengan Timor Leste, di desa-desa yang langsung berbatasan dengan sungai. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan desa yang dilewati sungai dimana hulu dan hilirnya berada di dua negara, sehingga persoalan permasalahan RI dan RDTL berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air dapat diperoleh (purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu).

Perjalanan penelitian untuk menjangkau wilayah perbatasan yang dibatasi sungai sebagai pembatas RI-RDTL. Dengan cara melihat kondisi WS Noelmina terlebih dahulu pada DAS Naekake di Desa Tasinifu, Desa Naekake A, di Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara. Perjalanan kembali dilanjutkan menuju WS Benenain pada DAS Alas di Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju DAS Talao di Desa Sarabau Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dan Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu. Survey ini diakhiri dengan mendatangi DAS Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.



Gambar 1. Peta Rute Perjalanan

3. TEORISASI

3.1. Gambaran Umum Perbatasan

Lingkup Wilayah Perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) terbagi ke dalam perbatasan darat dan perbatasan laut.

1. Perbatasan Laut

Kawasan perbatasan Laut Wilayah NTT dengan RDTL meliputi 5 Kabupaten, 5 Kecamatan:

- 1) Kabupaten Kupang : Kecamatan Amfong Utara,
- 2) Kabupaten Belu : Kecamatan Tasifeto Barat,
- 3) Kabupaten Malaka : Kecamatan Kobalima,
- 4) Kabupaten TTU : Kecamatan Insana Utara, dan
- 5) Kabupaten Alor : Kecamatan Alor Barat Daya.

2. Perbatasan Darat

Panjang perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste di Provinsi NTT secara keseluruhan sekitar 287 kilometer, yang terdapat di dua lokasi yang

berbeda, yakni : *Pertama*, wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan utama Timor Leste. Dan *kedua*, wilayah perbatasan yang melingkari wilayah Oecussi.

Perbatasan Indonesia-Timor Leste di kawasan pertama, terletak di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Covalima dan Bobonaro, dengan panjang perbatasan mencapai 172 kilometer yang memanjang dan membelah Pulau Timor menjadi dua bagian. Secara administratif, daerah Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Timor Leste adaiah Kec. Kobalima, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Lamaknen, dan Kec. Raihat.

Wilayah perbatasan yang rnelingkupi *enclave* Timor Leste (*Distrik Oecussi*) secara administratif terletak di Kabupaten Kupang (*Kec. Amfoang Utara*) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (*Kec. Insana Utara, Kec. Miomaffo Timur, dan Kec. Miomaffo Barat*). Panjang perbatasan di wilayah ini mencapai 115 kilometer, yang terdiri atas 104,5 kilometer berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, dan 10,5 kilometer berbatasan dengan Kabupaten Kupang.

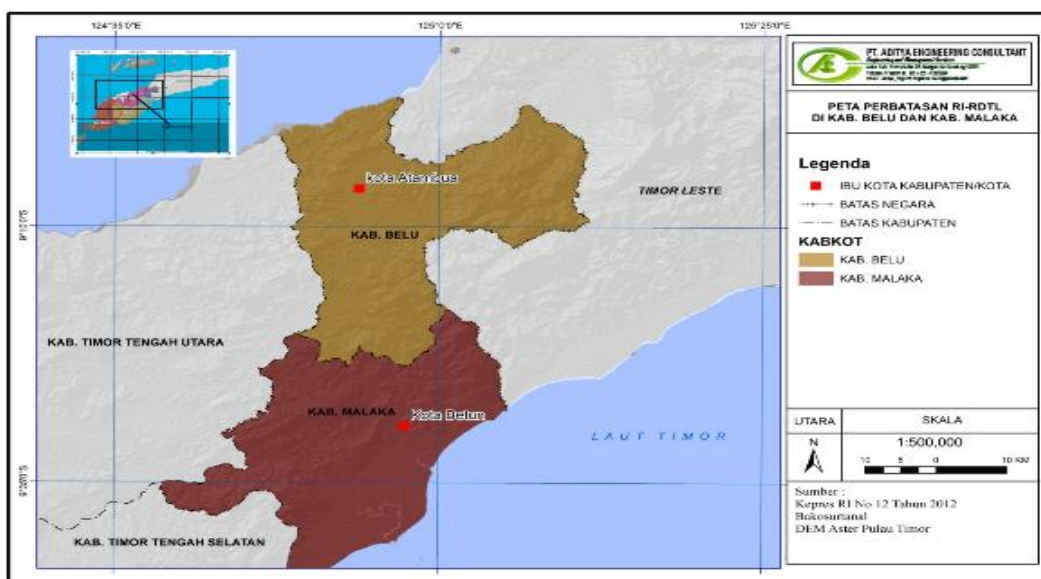
Di sepanjang perbatasan di Kabupaten Belu terdapat 7 titik simpang (*junction point*) yang merupakan pintu pelintas batas dan titik pos pengamanan bersama, yaitu Motaain, Motamasin, Nunura, Turiscain, Dilomil, Lakmars, dan Laktutus. Sementara di perbatasan yang melingkupi wilayah Oekussi terdapat 5 titik simpang yaitu, Wini, Napan, Bawah, Manusasi, Aplal, dan Oepoli.

Hampir semua perbatasan darat Negara Republik Indonesia dan RDTL adalah sungai. Di wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan utama Timor Leste, terdapat sungai Malibaka, Baukama dan Motamasin. Sedangkan di wilayah perbatasan yang melingkari wilayah Oekussi terdapat sungai Aplal. Beberapa sungai yang secara langsung menjadi pembatas kedua negara ini, ada yang memiliki hulu di Indonesia, ada juga yang berhulu di RDTL. Selanjutnya sungai-sungai ini mengalir atau bagian tengah dan hilirnya melintasi kedua

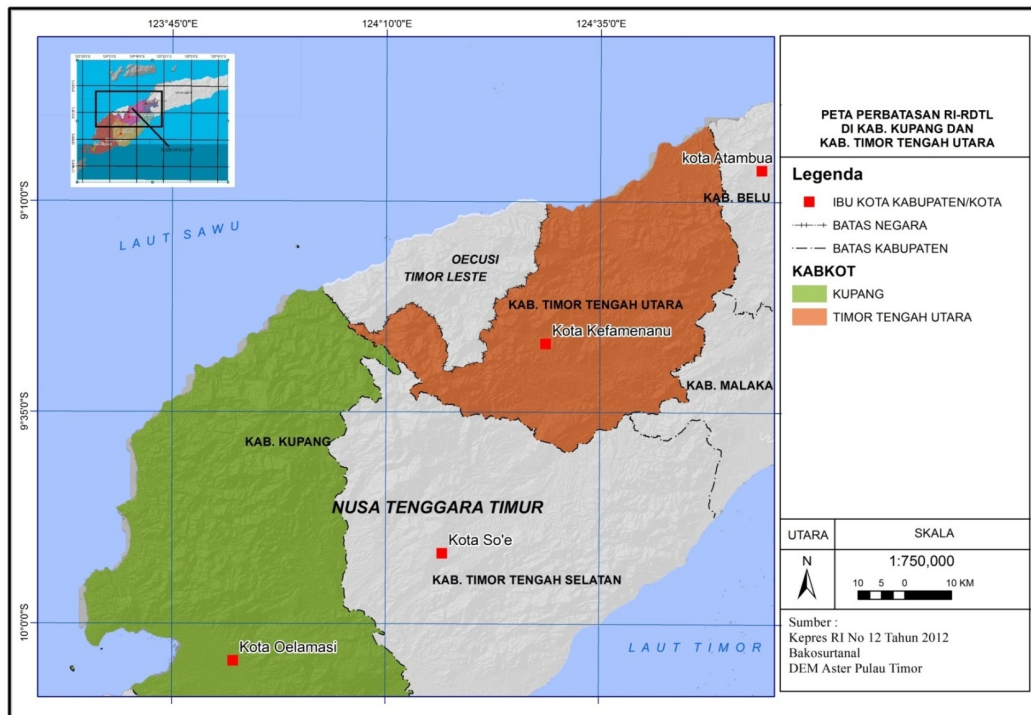
negara dan menjadi perbatasan dari kedua negara ini. Posisi sungai yang berada di dua negara, bisa dibaca melalui tabel berikut :

Tabel 1. Sungai Yang Berbatasan Langsung dengan RDTL

Nama Sungai	Lokasi Sungai		
	Hulu	Tengah	Hilir
Aplal	Mutis (Indonesia)	Indonesia-RDTL	Indonesia – RDTL
Malibaka	RDTL	Indonesia – RDTL	RDTL
Baukama	Indonesia	Indonesia – RDTL	RDTL
Motamasin	Indonesia	Indonesia – RDTL	Indonesia – RDTL



Gambar 2. Peta Perbatasan NKRI-RDTL



Gambar 3. Peta Perbatasan NKRI-RDTL (2)

3.2. Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Secara eksplisit karakteristik dasar sumberdaya air antara lain:

- Dapat mencakup beberapa wilayah administratif (*cross-administrative boundary*) dikarenakan oleh faktor topografi dan geologi dipergunakan oleh berbagai aktor (*multi-stakeholders*).
- Bersifat sumberdaya mengalir (*flowing/dynamic resources*) sehingga mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara kondisi kuantitas dengan kualitas, antara hulu dengan hilir, antara *instream* dengan *offstream*, maupun antara air permukaan dengan air bawah tanah.
- Dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (antar generasi).

Dalam Undang-Undang Sumber Daya Air No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) terdapat 3 aspek utama dan 2 aspek pendukung, yaitu : aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air (SISDA) dan pemberdayaan masyarakat.

3.3. Peran Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Roger H. Soltau dalam Budiardjo (2009), mendefinisikan negara sebagai alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama rakyat. Harold J. Laski (Budiardjo, 2009), menyatakan negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Dari pendapat di atas, negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mempunyai yang bersifat memaksa, mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama rakyat.

Lebih lanjut, Roger H. Soltau (Budiardjo, 2009) mengemukakan tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Akan tetapi setiap negara terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak diperlukan, yaitu : a) melaksanakan penertiban sebagai stabilisator b) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya c) pertahanan d) menegakkan keadilan.

Kaitannya dengan penelitian ini, negara hadir untuk menjamin tercukupinya kebutuhan air melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu di wilayah perbatasan RI_RDTL.

4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten TTU

Dari desa Oelbuubuk, kecamatan Mollo Utara ke arah desa Tasinifu melewati sungai Sebau dengan jembatan Sebaunya. Ketika melewatinya, airnya sedikit, sungai ini mengalir ke sungai Benenain. Dari desa Oelbubuk ke desa Tobu, kecamatan Eban, disini terdapat embung kecil. Di kecamatan yang sama, melewati sungai Bijeli di desa Bijeli. Kecamatan Eban merupakan kecamatan yang paling luas Di Timor Tengah Selatan (TTS). Menuju ke desa Tasinifu, daerah ini memberi panorama yang sangat eksotik. Padang savana, bak lapangan golf yang ditata oleh alam, cemara, johar, kemiri, pohon kayu putih dan pinang menghiasi di sisi kanan kiri jalan yang terjal. Beberapa binatang yang ada disana : rusa, monyet, musang, kuda dan burung-burung langka, seperti nuri. Di pinggir jalan ini, kadang kita temui rumah bulat,

rumah adat Timor. Sebelum sampai ke desa Tasinifu, melewati bukit cinta Oelbinose. Kami pikir bukit itu untuk berpacaran, tapi ternyata mengapa dinamakan bukit cinta, karena di bukit ini para penjaga perbatasan bisa dapat sinyal, sehingga bisa telpon dengan keluarga atau pacar. Di lokasi dekat bukit cinta, terdapat pos penjagaan Oelbenose.

Total jumlah penduduk desa ini kurang lebih 4.500 jiwa, terdiri dari 900 KK. Sebagian besar penduduknya sebagai petani (90%), sisanya sebagai guru, pensiunan dan buruh tani. Sebagian besar beragama Katolik (90%), selebihnya sekitar 10% beragama Kristen Protestan. Semua penduduk di desa Tasinifu adalah penduduk asli, dengan lama tinggal lebih dari 20 tahun.

Dari bertani sawah padi, masyarakat petani di desa ini menikmati masa panen 2 kali. Untuk lahan kering ditanami kacang tanah, dari luas 1 hektar bisa menghasilkan 100 karung. Disamping itu, masyarakat menanam kopi untuk kebun mereka.

Dari Eban, untuk bisa mencapai desa ini harus melewati sungai, yang dinamakan sungai besar. Sungai ini yang kemudian menjadi satu dengan sungai Aplal, sungai yang muaranya sampai ke desa Oepoli. Bila ditelusuri sungai Aplal ini sampai ke Kupang, yang merupakan sungai perbatasan RI-RDTL. Pada musim hujan, sungai besar tidak bisa dilewati, karena tidak ada jembatannya. Bila akan menyeberang ada jasa pengangkutan, dengan cara menggendong. Untuk jasa menggendong orang biayanya Rp. 20.000, untuk kendaraan Rp. 50.000.

4.2. Gambaran Umum Desa Naekake A Kecamatan Mutis Kabupaten TTU

Desa Naekake A merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mutis dengan luas wilayah seluas 510 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Timor Leste Distrik Oekusi
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Noelelo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tasinifu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Naekake B

Topografi desa Naekake A cenderung kasar berbentuk dataran tinggi dengan dataran tersebar secara sporadic pada gugusan yang luas dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran tinggi terbatas baik pertanian lahan kering maupun lainnya. Pertanian lahan kering banyak dilakukan atau dikerjakan oleh masyarakat namun hasil produktivitas masih sangat rendah karena dipengaruhi oleh suhu dan iklim yang tidak menentu.

Keadaan iklim di desa Naekake A pada umumnya sama dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Suhu udara rata-rata sekitar pada maksimum 30 sampai 36 derajat celcius dan suhu minimum 21 derajat celcius sampai 24.5 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata adalah 1.164 mm/tahun. Salah satu unsur penting pembentuk iklim di atas adalah curah hujan. Curah hujan sangat bervariasi. Keadaan curah hujan di wilayah ini pada umumnya sulit diramalkan, datangnya hujan dan mulainya bulan kering kadang-kadang terlalu cepat dan kadang-kadang terlalu lambat.

Penduduk desa Naekake A pada tahun 2009 sebanyak 1572 jiwa dan pada 31 Desember 2010 sebanyak 1596 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 1.5%. Penduduk terbanyak di RT 19/RW 19 dengan jumlah 95 jiwa dengan 23 KK dengan pertumbuhan 10.19% dan penduduk terkecil/terendah di RT 8 RW 08 dengan jumlah 49 jiwa dengan 12 KK dengan tingkat pertumbuhan 1.5%.

Desa Naekake A terdiri dari 427 KK, sebagian besar beragama Katolik, dengan mata pencaharian terbanyak sebagai petani. Di desa ini terdapat 15 kelompok tani. Usaha pertanian berupa padi ladang dan padi sawah. Untuk lahan kering ditanami kacang tanah.

Seperti di desa Tasinifu, untuk penerangan warga menyewa teknologi surya sel dari PLN. Warga harus membayar Rp 36.000 tiap bulannya. Bila menunggak atau tidak mampu bayar dicabut alatnya. Alat ini terpasang di atas rumah. Rumah di desa ini ada yang sudah berinding tembok, tapi ada pula yang masih menggunakan kayu dengan atap daun.

Hubungan antar warga RI-Timor Leste baik, bahkan dekat desa ini terdapat pasar bersama, tempat bertemunya untuk menjual beli barang-barang warga RI dan Timor Leste. Pasar ini buka tiap hari Kamis, dari jam 07.00 sampai jam 14.00. Warga Timor Leste bila masuk ke pasar ini, tidak perlu paspor, hanya perlu lapor kepada petugas.

4.3. Gambaran Umum Desa Sarabau Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu.

Desa Sarabau merupakan salah satu desa yang juga langsung berbatasan dengan Timor Leste. Di desa ini mengalir dan merupakan pertemuan dua sungai yaitu sungai Baukama dan sungai Talao, yang bermuara di Sarabau. Desa ini tepat berada di bawah kaki gunung Lakaan, yang bagi kepercayaan masyarakat lokal setempat, dimana di gunung ini masih berdiam komunitas masyarakat adat yang sangat mensakralkan hutan. Di desa Sarabau, ada dua dusun yaitu dusun Asulaik dan Dusun Makudomo yang langsung berbatasan dengan Timor Leste yaitu pada Distrik Bobonaro (Maliana). Di desa ini, meskipun ada berbagai sub-sub suku, namun sub suku yang berkuasa di desa ini adalah suku Malenulu.

Selain dua sungai ini, ada sumber air lain yang dimanfaatkan oleh penduduk desa Sarabau untuk persawahan yaitu mata air Wewot dan mata air Titik Rai. Desa ini memiliki potensi galian yaitu batu, dan pasir.

Seperti penduduk pulau Timor di perbatasan pada umumnya, di desa ini banyak penduduk lokal yang kawin dengan penduduk masyarakat Timor Leste.

4.4. Gambaran Umum Desa Asumanu Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu.

Di desa Asumanu, mengalir sungai Baukama, yang bermuara ke Timor Leste, dimana sungai ini akan bertemu dengan sungai Malibaka di desa Maumutin. Penduduk desa ini ada 1169 jiwa, dengan 488 KK. Selain sungai, di desa ini juga terdapat beberapa mata air yaitu mata air Weibora, Weimata dan mata air Wemalimate. Sumber air inilah yang digunakan penduduk desa untuk keperluan minum, dan mencuci juga untuk pengairan. Karena sumber mata air berada pada dataran rendah, sementara desa ini berada pada dataran tinggi, maka desa ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air. Untuk mendapatkan air, pada dua sumber mata air ini, penduduk perlu berjalan sejauh kurang lebih 1 kilometer. Alat yang digunakan untuk mengambil air dari mata air ini adalah ember dan juga jerigen.

Mata air Weimata digunakan oleh tujuh dusun dari desa ini yaitu dusun Lokomea, dusun Ninluli, dusun Leunen, dusun Leumanengai, dusun Lakmau, dusun Makorek, dan Dusun Badaen.

4.5. Gambaran Umum Desa Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

Desa Maumutin merupakan salah satu desa yang berbatasan sungai dengan Timor Leste. Desa ini hampir sama dengan desa Alas Selatan di kabupaten Malaka, desa Motaain di Kabupaten Belu, dimana seberangnya langsung ditemukan pemukiman penduduk Timor Leste. Di seberang sungai yang merupakan wilayah Timor Leste, sebelum referendum, pernah bermukim transmigran dari Bali yang mengolah tanah di bibir sungai Malibaka menjadi areal persawahan. Hampir sama dengan semua desa-desa perbatasan seperti Naekake, dan Tasinifu yang berbatasan dengan Oekusi, persoalan utama yang dihadapi di desa ini adalah akses listrik, rusaknya kondisi jalan, dan telekomunikasi. Untuk persoalan komunikasi, desa ini maupun desa Naekake sering kena *roaming* karena jaringan telepon yang mereka akses adalah jaringan telepon Timor Leste, dengan providernya yaitu Telkomsel (Timor Telekom). Sementara, tower Telkomsel yang dibangun desa ini – menurut Kepala Desa dan juga aparat yang bertugas di perbatasan hanya sekedar pajangan.

Maumutin sebenarnya merupakan sentra produksi untuk pertanian dan hortikultura. Desa ini, sebenarnya merupakan lumbung makanan bagi Kabupaten Belu di Kecamatan Raihat. Lahan pertanian yang dimiliki di desa ini 45%-nya adalah milik penduduk lokal desa Maumutin dan 55% sisanya dimiliki oleh penduduk eks Timor Leste. Di ujung desa ini terletak pos perbatasan yang dinamakan Turis Kain. Di bibir Turis Kain mengalir sungai Malibaka, dimana hulu sungai ini berada pada wilayah Timor Leste, tengahnya di Indonesia salah satunya mengalir melewati Maumutin dan hilirnya ke Timor Leste melalui Nunura.

4.6. Gambaran Umum Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka

Desa Alas Selatan merupakan salah satu dari 4 desa yang secara administratif berada di kecamatan Kobalima. Desa lainnya : desa Alas, desa Alas Utara dan desa Kota Baru. Desa ini adalah desa terluar, langsung berbatasan dengan Timor Leste, yang dipisahkan oleh sungai Motamasin. Nama Motamasin artinya air garam. Jarak desa dengan sungai hanya sekitar 100 meter.

Penduduk sebagian besar bertani, dan sebagian besar beragama Katolik. Di desa ini banyak pendatang dari Jawa, dan beberapa dari etnik Cina. Warga keturunan Cina menguasai perekonomian dengan cara sebagai pengumpul hasil pertanian di desa ini, kemudian dipasarkan ke luar pulau, seperti Jakarta dan daerah lainnya. Hasil pertanian yang dikirim keluar pulau diantaranya : mete, asam, rotan dan kopra.

Karena berbatasan langsung dengan Timor Leste, disini terdapat jalan negara. Yakni jalan yang selalu digunakan untuk berlalu-lalang RI – Timor Leste. Bila bepergian lintas negara, warga cukup menggunakan Pass Lintas Batas (PLB). PLB berlaku 1 tahun, sekali pakai paling lama 10 hari.

Batas negara RI dan RDTL berupa sungai. Batas berupa sungai ini sudah ada sejak penjajahan Portugis, sekitar tahun 1912. Pada waktu itu mengenal kekuasaan di tangan Raja. Kekuasaan Raja 1 sampai raja ke 4, masih belum mengalami regulasi mengenai pemerintahan desa dengan kepala desa sebagai kepala pemerintahan tingkat desa. Setelah Raja ke 5, kemudian mengenal juga kepala desa. Raja diangkat berdasar keturunan, namun pemerintah Belanda pada waktu itu juga mengakuinya, bahkan kemudian menyekolahkan ke Belanda. Setelah selesai sekolah di Belanda baru diangkat menjadi raja. Sejak RI terpisah dari RDTL, Timor Leste mempunyai Raja baru.

5. PEMBAHASAN

Kehadiran Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Perbatasan Negara Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste (RI – RDTL)

Dalam bagian ini disajikan temuan lapangan di 6 desa perbatasan : yakni di desa Tasinifu, Desa Naekake A, kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), desa Sarabau dan desa Asumanu Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu, desa Maumutin, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, dan Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, mengenai kehadiran negara dalam pengelolaan SDA dari 5 aspek : konservasi, pendayagunaan, daya rusak, kelembagaan dan sistem informasi SDA yang terdapat di lokasi penelitian.

5.1. Konservasi Sumber Daya Air.

Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaannya, baik kini maupun di masa yang akan datang. Konservasi adalah sebuah upaya pelestarian lingkungan.

Masyarakat di Tasinifu dan Naekake, memiliki kedekatan dengan alam, melalui daya perseptual masyarakat terhadap lingkungan simbolis transendental yang didukung dengan sistem sosial dan sistem budaya setempat.

Pusat dari pemaknaan sumber air berada di gunung Mutis. Menurut sistem budaya Timor, setiap suku harus memiliki sumber air. Di gunung Mutis terdapat 8 sumber mata air besar, yang dikuasai 8 suku besar. Kecuali itu terdapat 324 sumber mata air kecil yang dikuasai suku-suku kecil. Setiap tahun para ketua adat suku-suku besar, melakukan upacara adat di gunung Mutis. Upacara ritual tersebut menunjukkan pemaknaan sumber air yang dikeramatkan, dihormati, sehingga terpelihara keberadaannya. Sebuah konsep hubungan manusia dan air yang dibingkai dalam keyakinan.

Dari cerita camat Mutis, kedekatan hubungan manusia dengan air dibuktikan bila ada tamu meskipun dari jauh sekalipun, bila tidak dikehendaki masyarakat setempat, maka bisa “memerintah” hujan supaya turun. Padahal bila hujan turun, tidak bisa masuk desa itu, karena harus menyeberang sungai yang banjir yang tidak ada jembatannya. Jadi, kebutuhan konservasi air telah sangat terpelihara melalui sistem kepercayaan masyarakat setempat. Hubungan penghormatan terhadap sumber mata air akan menciptakan hubungan saling menyesuaikan yang mengarah pada pembentukan perilaku pelestarian sumberdaya air.

Air yang berasal dari Gunung Mutis menghidupi sebagian besar warga Timor. Keberadaan sistem kepercayaan Timor menjadi vital untuk menjaga kelestariannya. Yang bisa dilakukan pemerintah, sebagaimana saran Camat Mutis, membantu kebutuhan ritua (sapi, atau lainnya) tiap tahunnya untuk upacara di gunung Mutis. Tidak terlalu besar bila mengingat Gunung Mutis adalah gunung yang memberi air kehidupan bagi sebagian besar warga Timor. Serta menjaga sistem kepercayaan Timor dari polusi kapitalisasi apapun itu, baik kepetingan pariwisata, atau industrialisasi air gunung Mutis.

Sebagai desa yang berada di bawah kaki gunung Lakaan, desa Sarabau merupakan desa yang memiliki komunitas adat yang ikut melestarikan hutan. Hampir sama dengan komunitas yang berada di gunung Mutis, masyarakat ini memiliki keyakinan bahwa agar dapat disebut sebagai orang Belu, ada dua syarat yang harus dimiliki. Pertama yaitu harus memiliki rumah adat dan yang kedua harus memiliki air. Agar dapat memiliki rumah adat orang tersebut harus memiliki kayu, atau pohon sebagai bahan pembangun rumah, dan setelah rumah itu didirikan dan dikatakan layak untuk dihuni, orang tersebut harus memiliki mata air dan mengambil air

dari mata air tersebut untuk kebutuhannya. Menurut Camat Raihat, konsep ini memiliki implikasi luas pada konservasi. Artinya secara tidak langsung, setiap komunitas penghuni gunung Lakaan, seperti komunitas penghuni gunung Mutis, agar dapat memiliki air, orang tersebut harus merawat pohonnya, dan agar dapat memiliki rumah adat untuk menampung keluarga bahkan klannya (sub sukunya), orang tersebut harus menggunakan kayu secara bijak.

Bagi komunitas adat Belu, segala sesuatu berkaitan dengan air. Ketika selesai panen misalnya, sebelum hasil panen dinikmati oleh keluarga atau klannya, maka hasil panen pertama harus dimasak, dan untuk memasak itu, orang tersebut harus mengambil air dari mata airnya sendiri. Sebab, jika dia tidak dapat mengambil dari mata airnya sendiri, maka menurut keyakinan orang Belu, dia belum dapat disebut sebagai orang Belu. Implikasi dari keyakinan ini, secara turun temurun, meskipun air dapat dibagi ke masyarakat atau sub suku atau klan yang lain, namun memiliki mata air sendiri adalah mutlak. Karena itu, menjaga ketersediaan air dari mata airnya sendiri adalah hal yang mendasar dilakukan oleh masyarakat ini.

Meskipun berada di bawah kaki gunung Lakaan, desa Asumanu, tergolong desa yang gersang. Karena itu pada musim kemarau, beberapa sumber air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa ini menjadi kering. Karena berada pada dataran yang sedikit rendah, maka hampir semua wilayah desa ini dimanfaatkan untuk pertanian baik itu lahan kering maupun tadah hujan. Inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi perlindungan atau konservasi pada wilayah tangkapan air, yang sebenarnya mengalirkan air dengan debit 100 liter/detik yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidupnya. Sementara sungai Baukama maupun sungai Malibaka yang berjarak sekitar 3 – 5 Km dari desa belum dapat dimanfaatkan oleh penduduk karena untuk sungai Baukama, topografi untuk menuju sungai tersebut berbentuk tebing, sementara sungai Malibaka belum dapat dimanfaatkan karena belum ada fasilitas penunjang, baik berbentuk perpipaan ataupun pompa hidran untuk dapat mengalirkan air.

Masyarakat Maumutin mempunyai sistem kepercayaan untuk menjaga konservasi alam yang mereka miliki. Di desa itu terdapat hutan adat, menurut mitos yang tumbuh dalam sistem kepercayaan mereka bila ambil kayu untuk dipotong, bila tidak diijinkan maka ada burung hantu yang mengikuti, yang menyebabkan orang yang memotong kayu tersebut mengalami sakit atau celaka. Bisa saja memotong kayu di hutan adat bila memang ada kayu yang bagus untuk membangun rumah adat, tetapi harus memotong babi dulu untuk upacara disana. Masih berkembang baiknya nilai budaya tersebut, bisa memelihara kelestarian hutan dan menghindari eksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi semata. Dan hutan adalah tangkapan air sumber daya air bisa lestari.

Di desa Alas Selatan terdapat hutan adat sebagai hutan lindung. Namun dari 4 desa di Kobalima Timur, desa Alas Selatan yang paling sedikit memperoleh air dari sumber air yang ada. Terkait dengan berkurangnya sumber air ini, kemungkinan karena masih terdapat pengelolaan pertanian dengan sistem ladang berpindah, walaupun tidak semua. Sebagian lagi

dengan sistem menetap. Untuk membuka lahan kebun, kadang harus menebang pohon, bahkan dengan pohon yang telah mempunyai lingkaran batang 100 cm. Baik ladang berpindah maupun menetap, tidak seperti waktu jaman dahulu, penetapannya berdasarkan kepemilikan.

Menurut adat Timor, kepemilikan tanah diwariskan dengan dibagi-bagi berdasarkan jumlah anak. Namun bila menikah, laki-laki “kawin keluar”, bila laki-laki menikah, dia tidak mendapat warisan, yang menerima warisan perempuan. Mengapa demikian, karena adat setempat mensyaratkan laki-laki untuk membayar belis atau sebagai mas kawinnya. Bila pembayaran belis belum lunas, maka laki-laki harus mengerjakan tanah perempuan. Kecuali bila “beli putus”, perempuan tidak mendapat warisan.

Dua sungai di Alas Selatan, yakni sungai Motamasin dan sungai Mota Babulu, mempunyai hulu di perbatasan RI-Timor Leste. Keduanya mempunyai sumber yang berbeda. Namun kondisi di hulu sekarang kering, kemungkinan karena sistem ladang berpindah yang menyebabkan terjadinya berkurangnya tanaman di daerah hulu.

5.2. Pendayagunaan Sumberdaya Air

Masalah terkait pendayagunaan sumber daya air yang muncul di desa Tasinifu dan Naekake adalah permasalahan pemenuhan kebutuhan air karena belum memadainya sarana dan prasarana keairan. Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum terpenuhinya kebutuhan air. Hingga saat ini, pemenuhan air bagi penduduk di daerah perbatasan, baik untuk keperluan domestik maupun untuk keperluan pertanian masih belum mencukupi. Hal ini tergambar jelas dengan kondisi di lapangan yang ditemukan, yakni sebagian besar penduduk di daerah perbatasan harus bergerak berkilo-kilo meter untuk mendapatkan air untuk keperluan domestik. Adapun fakta belum terpenuhinya air bagi keperluan pertanian, tergambar jelas dengan fakta di lapangan, bahwa sebagian besar daerah perbatasan tidak memiliki sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Sebagian dari penduduk perbatasan hanya dapat menanam padi satu musim saja dalam setiap tahunnya, sementara sebagian lagi penduduk yang sama sekali sulit mendapat air untuk pertanian mengkonsumsi ubi dan ubi kayu sebagai bahan makanan mereka, itu pun jika mereka dapat memperolehnya.

Daerah ini bukannya kekurangan air. Air cukup berlimpah dengan 8 sumber mata air besar dan 324 sumber mata air kecil. Hanya persoalannya, sumber air tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan warga, terutama pada musim kering karena belum tercukupinya sarana mengalirkan ke warga-warga. Terdapat 35 mata air berada di bawah permukiman warga, sehingga perlu mengangkat air sampai ke rumah warga, sayangnya belum ada pompa air atau kincir air yang bisa mengangkat air. Masyarakat mengatasinya dengan cara mengurangi penggunaan air.

Masalah mengalirkan air sampai ke rumah warga, sebelumnya menggunakan kayu, tapi banyak yang rusak karena hujan. Sedangkan perpipaan yang selama ini dilakukan, kurang tepat karena di saat air banyak justru kotor karena tanpa penyaring. Menurut warga, seharusnya digunakan ijuk, tidak seperti saat ini yang langsung ke air, sehingga menyebabkan air yang keluar kotor. Di lokasi ini sudah ada reservoir (penampungan air) tapi hanya 2 minggu saja air bisa mengalir melalui reservoir ini, setelah itu tidak ada air yang keluar.

Di Mutis ini terdapat 1000 hektar lebih lahan tidur. Seandainya ada bendungan dengan sistem saluran permanen pasti akan mengalami surplus pangan. Seumpama tiap tahun untuk tiap hektar dihitung hanya menghasilkan 5 ton padi, akan menghasilkan 5000 ton padi setiap tahunnya. Sedangkan kebutuhan penduduk hanya sekitar 2000 ton per tahun, jadi ada surplus 3000 ton, itupun kalau dihitung hanya 1 kali panen. Tapi tidak tahu mengapa perhatian pemerintah dianggap kurang terhadap lokasi ini. Pada tahun 2006/2007 wilayah ini

hanya masuk prioritas 3. Seharusnya, dengan lokasi yang terbelakang dan terisolir menjadi prioritas pembangunan.

Dalam hal potensi pengembangan SDA, juga erat kaitannya dengan pemerataan sarana dan prasarana keairan, sangat diperlukan adanya upaya pemerataan sarana dan prasarana keairan yang menyeluruh, dengan lebih banyak membangun embung, jaringan irigasi, dan jaringan sumber air domestik. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya wilayah di NTT masih memiliki potensi keairan yang belum terdayagunakan sepenuhnya, dengan masih terlalu banyaknya air yang terbuang ke laut daripada yang dapat ditahan di darat dan didayagunakan untuk kepentingan DAS, terutama di kawasan perbatasan

Di desa Sarabau ini air sungai Sarabau maupun sungai Talao dimanfaatkan oleh penduduk desa untuk pengairan. Disamping itu, bagi penduduk lain, sungai ini juga dimanfaatkan untuk mencuci dan mandi. Sementara itu, pada sebagian penduduk lain, telah ada saluran PDAM yang bersumber dari mata air Lahulus dari Kabupaten Belu yang menjangkau hingga ke desa Sarabau, sehingga desa ini menurut kepala desa tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber air.

Sebagai konsekuensi dari wilayah yang langsung berbatasan dengan Timor Leste, sungai Sarabau maupun sungai Talao masih banyak dimanfaatkan oleh penduduk desa Sarabau dibandingkan dengan penduduk desa Timor Leste. Hal ini karena topografi yang menuju Timor Leste setelah sungai ini adalah wilayah perbukitan dan juga pegunungan. Sementara desa Sarabau, meskipun topografinya sedikit menanjak, karena berada di kaki gunung Lakaan, namun sebagian penduduk desa membangun pemukiman pada dataran rendah sehingga lebih mudah memanfaatkan kedua sungai ini sebagai pengairan untuk pertanian maupun untuk kebutuhan mandi dan mencuci.

Seperti disebutkan dua sungai besar yang selalu mengalir bahkan pada musim kemarau yaitu sungai Baukama dan sungai Malibaka yang bermuara ke Nunura Distrik Bobonaro Timor Leste, namun, karena persoalan topografi ke sungainya maupun topografi desa Asumanu sendiri dan juga jarak serta fasilitas pendukung, maka penduduk desa Asumanu lebih banyak memanfaatkan beberapa mata air seperti disebutkan di atas untuk kebutuhan-kebutuhan.

Sementara dari pihak Timor Leste, menurut kepala Desa Asumanu belum memanfaatkan sungai Baukama, karena jarak pemukiman dengan sungai sangat jauh, disamping itu topografi wilayah yang berbukit dan bergunung-gunung yang memberikan peluang yang kecil untuk pemanfaatannya. Namun demikian, karena sungai Baukama juga bermuara ke Timor Leste melalui Nunura, maka (kemungkinan) di manfaatkan oleh masyarakat Timor Leste.

Selain sungai Malibaka yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, desa Maumutin ini juga memiliki enam mata air, dimana tiga mata air berada di dataran rendah dan tiga lainnya berada di dataran tinggi. Dalam mendapatkan air untuk kebutuhan lain seperti mandi, minum dan cuci, desa ini menggunakan pipa dari sumber air Sakis. Sayangnya, karena ukuran pipa ini terlalu kecil yaitu 2 dim, terjadi kerusakan pada pipa. Persoalan utama dalam mendapatkan air adalah bahwa jika air dialirkan melalui pipa, pipa tersebut perlu melewati perbukitan.

Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa Maumutin tentang pengairan yang dimanfaatkan dari sungai Malibaka adalah sering terjadi erosi ketika musim hujan tiba. Sementara itu jika pada musim kemarau, karena debit air yang berkurang, untuk mengalirkan air ke sawah, penduduk desa menggunakan saluran irigasi manual, yaitu dengan cara membendung air menggunakan batu-batu sungai dan mengalirkannya ke sawah-sawah. Sebenarnya telah dibangun saluran irigasi, namun saluran tersebut tidak berfungsi sebagaimana perannya. Pemanfaatan sungai Malibaka, sebagai pengairan sawah di desa ini yaitu sekitar 200 hektar sawah, sementara itu masih ada sekitar 60 hektar tanah yang masih belum dimanfaatkan dan tetap menjadi lahan tidur.

Penggunaan sungai Malibaka belum menjadi masalah dengan masyarakat Timor Leste hingga saat ini, namun demikian, perlu dibangun juga saluran irigasi, karena sementara ini, menurut Kepala Desa tiap hari ada sekitar 30 warga 5 USD/ hari yang dibayar oleh pihak Timor Leste untuk juga membangun saluran irigasi, guna memanfaatkan lahan yang dulunya pernah dimanfaatkan oleh transmigran Bali ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia.

Masyarakat desa Motamasin memenuhi kebutuhan airnya dari sumber air yang ada disana, atau dengan menggunakan sumur. Tidak ada warga yang mengambil air dari sungai Motamasin. Untuk menarik air dari sumber air, masyarakat berswadaya mengusahakan sendiri dengan pipa.

Kemudian mengenai permasalahan belum meratanya sarana dan prasarana keairan, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa hingga saat ini di beberapa daerah di perbatasan masih belum memiliki sarana dan prasarana sumber air baku, sehingga sebagian penduduk perbatasan harus bergerak berkilo-kilo meter untuk mendapatkan air. Adapun untuk keperluan pengairan pertanian, sarana dan prasarana pengairan pun masih belum memadai, dengan fakta bahwa umumnya persawahan di perbatasan hanya dapat ditanami satu musim saja dalam setiap tahun.

Desa Alas Selatan telah mendapatkan air dengan cara dialirkan melalui pipa. Meskipun demikian, pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan air di desa ini menjadi rusak, akibat dari perbaikan jalan negara yang melintas hingga ke batas negara Timor Leste. Meskipun telah ada usulan atau pengajuan untuk memperbaiki pipa-pipa yang rusak, namun demikian, hingga studi lapangan ini dilaksanakan realisasi untuk memperbaiki pipa-pipa tersebut belum dilaksanakan. Karena itu, masyarakat desa Alas Selatan Motamasin ini kembali menggunakan sumur galian sebagai sumber mata air untuk keperluan makan, mandi, mencuci dan memasak.

Sebenarnya, hampir dua kilometer dari desa Alas Selatan, terdapat sungai Mota Babulu, dimana menurut Sekretaris Camat Kobalima, meskipun pada musim kemarau sungai ini mengalami penurunan debit air, namun demikian sungai ini tidak pernah menjadi kering (dalam istilah masyarakat lokal disebut kali mati). Namun, sungai Mota Babulu ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, karena faktor jarak untuk mendapatkan airnya, dan juga fasilitas penunjang untuk mengalirkan air ini ke lokasi-lokasi yang dibutuhkan seperti pemukiman dan juga wilayah-wilayah pertanian.

5.3. Pengendalian Daya Rusak Air.

Jenis permasalahan daya rusak air yang terjadi di wilayah perbatasan antara lain daya rusak air dalam bentuk erosi tebing sungai, berpindah-pindahnya tebing sungai, banjir, kerusakan sarana prasarana keairan. dan penyakit yang diakibatkan oleh buruknya kualitas air.

Permasalahan erosi/gerusan tebing sungai dan berpindah-pindahnya badan sungai sebenarnya memiliki satu akar permasalahan yang sama, yakni dari fitur geologi yang dimiliki pulau Timor. Pulau timor yang dahulunya diduga terbentuk akibatangkatan dasar laut akibat pergerakan tektonik lempeng bumi, mengakibatkan jenis batuan yang umumnya ditemui di daratan adalah batuan kapur dan formasi-formasi karst. Fitur geologis ini menyebabkan tanah yang dilalui hujan atau aliran permukaan air tidak mampu menahan air seoptimal bebatuan/tanah yang umumnya ditemui di Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Akibatnya, pada event-event hidrologi ekstrem seperti hujan yang sangat deras, tanah pada DAS-DAS di pulau Timor cenderung lebih sulit untuk menahan aliran air. Akibatnya, banjir yang terakumulasi di daerah hilir dapat menjadi sangat besar, sementara kandungan air yang tertahan lebih sedikit. Keadaan ini kemudian dikombinasi dengan mudah tererosinya batuan kapur. Tingginya besaran

banjir dikombinasi dengan mudahnya badan sungai tererosi menyebabkan sungai yang berpindah-pindah.

Permasalahan lain yang muncul adalah banjir. Permasalahan banjir yang terjadi di daerah perbatasan umumnya terjadi di daerah hilir sungai. Banjir terjadi dalam waktu singkat namun dengan ukuran yang sangat besar, sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa karakteristik banjir ini merupakan akibat dari fitur geologi yang dimiliki oleh daerah kajian. Dampak utama dari banjir ini, selain berpindah-pindahnya aliran sungai adalah terputusnya jalur transportasi yang menghubungkan daerah perbatasan dengan daerah sekitarnya. Hal ini terutama dikarenakan oleh jalan yang ditempuh untuk mencapai perbatasan dari daerah perkotaan harus melalui badan sungai kering. Badan-badan sungai tersebut hanya dapat dilalui pada saat sungai tersebut dalam keadaan kering ataupun hanya memiliki genangan air yang dangkal. Sebaliknya, pada saat banjir sungai-sungai tersebut tidak dapat dilalui, sehingga pergerakan barang dan manusia dari dan ke daerah perbatasan pun terhambat.

Permasalahan lain terkait pengendalian daya rusak air yang muncul adalah kerusakan sarana dan prasarana sumber daya air. Sebagian besar perbatasan antara RI dan RDTL merupakan badan air dalam bentuk sungai, yang sebagiannya dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk di sekitarnya, baik penduduk RI maupun RDTL. Untuk tujuan pemanfaatan ini diaplikasikan sarana dan prasarana sumber daya air. Permasalahan muncul ketika sarana dan prasarana tersebut rusak, kerusakan ini dapat terjadi pada sarana dan prasarana yang tepat berada di perbatasan RI dan RDTL, ataupun prasarana yang berada pada kawasan perbatasan, namun masih di dalam daerah NKRI.

Permasalahan yang muncul untuk kerusakan sarana dan prasarana keairan yang masih berada dalam NKRI adalah sulitnya untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana tersebut. Hal ini diakibatkan oleh sulitnya akses barang atau suplai bahan-bahan perbaikan untuk, kemudian kompetensi penduduk daerah sekitar yang belum dapat memperbaiki sarana dan prasarana keairan secara mandiri. Adapun untuk sarana dan prasarana sumber daya air yang tepat berada di perbatasan RI-RDTL, selain permasalahan serupa yang diakibatkan oleh sulitnya aksesibilitas dan kompetensi sumber daya manusia, juga sulitnya pelaksanaan perbaikan asset sarana dan prasarana karena harus melalui mekanisme kesepakatan pengelolaan antar negara RI-RDTL terlebih dahulu.

Adapun untuk permasalahan penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya air, umumnya terjadi ketika terjadi kekeringan, kemudian penduduk di daerah perbatasan hanya dapat memanfaatkan air dari sumber yang tidak layak seperti selokan atau genangan air kotor. Akibatnya terjadi penyakit-penyakit terkait buruknya kualitas sumber air seperti diare dan lain sebagainya. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan peningkatan

pemenuhan air untuk keperluan penduduk dan peningkatan aksesibilitas transportasi ke daerah perbatasan.

Persoalan-persoalan yang dihadapi secara umum pada masyarakat Belu adalah alih fungsi hutan. Hal ini terjadi karena topografi kabupaten Belu secara keseluruhan lebih landai cenderung berbentuk dataran rendah, dan jikapun berbentuk dataran tinggi, itu hanya pada wilayah-wilayah di dekat gunung Lakaan seperti di desa Sarabau. Kondisi topografi semacam ini, memberikan peluang bagi alih fungsi hutan dari fungsinya sebagai penyangga dan penangkap air, menjadi fungsi ekonomis seperti pertanian dan juga perkebunan. Jika diamati, hampir seluruh lahan di kabupaten Belu, bahkan hampir tidak lagi ditemukan tanaman endemik, karena hampir semua areal berganti dengan tanaman budidaya seperti jati. Ini sangat berbeda dengan kondisi yang ditemukan di wilayah Timor Tengah Utara atau daerah yang menuju Mutis, yang masih ditemukan banyak tanaman endemik (salah satunya kayu ampupu – tanaman endemik di pulau Timor), kecuali di wilayah Kefa – namun dugaan ini masih memberikan efek yang lebih kecil, sebab Kefa merupakan daerah hilir dan bukan daerah hulu sungai. Alih fungsi semacam ini tentu memberikan implikasi pada erosi dan juga banjir ketika musim penghujan tiba.

Banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai Mota Babulu cukup besar, yang menyebabkan pernah terjadi rumah hanyut. Beberapa KK memutuskan pindah ke tempat yang lebih tinggi, sebagian besar yang lain memilih bertahan di tempat. Sudah ada bantuan dari pemerintah berupa bahan makan dan alat-alat rumah tangga. Banjir selain mengakibatkan erosi, juga berakibat pada meluapnya air sungai Mota Babulu hingga ke pemukiman warga. Hal ini terjadi karena di desa Alas Selatan secara khusus maupun di kecamatan Kobalima secara umum berada pada topografi dataran rendah dan permukaan tanah yang rata.

Sebab lain terjadinya kerusakan sumber daya air adalah alih fungsi hutan. Selain masyarakat lokal, kehadiran masyarakat ex Timor Leste yang mendiami beberapa lokasi di sekitar kecamatan Kobalima, juga ikut memberikan kontribusi dalam penyumbangan erosi akibat dari pengalihan fungsi hutan sebagai lahan pertanian. Hal ini dapat dimengerti, saat mereka meninggalkan Timor Leste, mereka juga meninggalkan harta bendanya, juga lahan yang dimilikinya. Karena itu, meskipun mereka memahami bahwa ada lahan-lahan yang dianggap sakral, namun karena terdesak dengan tuntutan untuk bertahan hidup, mereka harus mengeksplorasi daerah-daerah tersebut untuk digunakan sebagai lahan pertanian.

5.4. Sistem Informasi Sumber Daya Air.

Permasalahan sistem informasi SDA di daerah perbatasan terjadi dalam dua bentuk, yakni ketersediaan sistem informasi SDA dari intern Indonesia sendiri, dan potensi kerja sama maupun konflik terkait sistem informasi SDA antar negara.

Mengenai sistem informasi SDA dari Intern Indonesia sendiri, kondisi saat ini sistem informasi SDA yang ada belum mumpuni dan belum dapat diandalkan karena minimnya ketersediaan data. Minimnya ketersediaan data SDA ini utamanya diakibatkan oleh minimnya jumlah stasiun pengamatan parameter-parameter SDA, belum optimalnya operasi dan pemeliharaan, dan kompetensi SDM terkait operasi dan pemeliharaan sistem informasi SDA. Adapun mengenai kerja sama maupun konflik terkait sistem informasi SDA antar negara, dalam hal ini RI dan RDTL, perlu disusun kerangka kerja mengenai *sharing* sistem informasi SDA, mengingat pada dasarnya sebagian dari daerah perbatasan RI dengan daerah perbatasan RDTL sebenarnya berada dalam suatu satuan hidrologi yang sama.

5.5. Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan kelembagaan yang terjadi di daerah perbatasan RI-RDTL, yakni terutama adalah minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA. Hal ini tergambar dalam fakta di lapangan bahwa masyarakat belum terlibat aktif sepenuhnya dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA, kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan dan perundang-undangan SDA, dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan SDA. Adapun dalam hal kelembagaan pengelolaan sumber daya air lintas negara, saat ini belum dimiliki kerangka kerja ataupun nota kesepahaman mengenai kerja sama pengelolaan sumber daya air lintas negara.

Seperti dipaparkan di depan, kelembagaan sumber daya air, lebih banyak dilakukan oleh komunitas adat di sekitar gunung Mutis (8 komunitas adat), dimana kelembagaan ini diwariskan secara tradisi karena berbasis keyakinan bahwa di puncak gunung Mutis berdiam para leluhur, dan karena itu wilayah sekitar puncak ini harus dijaga. Meskipun mendapatkan pengakuan dari masyarakat tentang keberadaan komunitas adat penyokong ketersediaan sumber daya air ini, namun demikian, seperti dituturkan oleh kepala desa maupun oleh camat Mutis sendiri, bahwa belum ada upaya dari pemerintah untuk turut serta dalam memberikan legitimasi kelembagaan melalui partisipasi aktif dalam menyediakan “korban” bagi upacara-upacara adat yang dilakukan oleh komunitas adat ini. Berdasarkan keyakinan inilah, terhadap leluhur inilah, maka disebutkan bahwa bahkan masyarakat Timor Leste yang berada di Distrik Oecusi, tidak memiliki rumah adat, namun rumah adat itu berada di wilayah Indonesia di Timor Tengah Utara, dimana jika ada keperluan-keperluan adat, akan dilaksanakan di situ bersama dengan saudara-saudaranya di Indonesia. Dengan ini maka perlu dirumuskan secara bersama bagaimana mendesain kelembagaan antar kedua negara dengan memberikan legitimasi pada kekuatan adat, yang telah terbukti sebagai penyangga konservasi di pulau Timor secara keseluruhan.

Hampir sama dengan persoalan komunitas adat yang dihadapi oleh komunitas adat di gunung Mutis, pada masyarakat Belu secara umum, meskipun masyarakat mengetahui secara

luas peran dari komunitas adat yang mendiami gunung Lakaan, namun, peran ini lebih banyak dikaitkan dengan mistik. Karena itu, komunitas ini dipandang sebagai komunitas terasing, dan belum dirangkul untuk didayagunakan dan dilegitimasi dalam sebuah kelembagaan resmi sebagai sebuah lembaga yang secara turun-temurun telah memberikan kontribusi dalam konservasi.

Hampir sama dengan kelembagaan sumber daya air di wilayah Mutis dan Belu, di daerah aliran sungai di desa Alas Selatan ini juga ada komunitas adat yang telah turun temurun menjaga sungainya, yang berpusat di hulu yaitu di gunung Lakaan. Namun demikian, belum ada upaya pemerintah baik RI maupun RDTL untuk bersama-sama mendukung komunitas adat ini dengan memberikan legitimasi secara kelembagaan pada komunitas ini dalam upaya mereka melakukan konservasi air.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.

Kehadiran Negara dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah perbatasan NKRI dan RDTL dirasa sangat lemah. Baik dalam aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, sistem informasi sumber daya air. Rekapitulasi permasalahan pengelolaan SDA di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Permasalahan Pengelolaan SDA

No.	Lokasi	Permasalahan (perlu campu tangan negara)
Permasalahan Terkait Konservasi SDA		
belum ada upaya pemerintah baik RI maupun RDTL untuk bersama-sama mendukung komunitas adat dengan memberikan legitimasi secara kelembagaan dalam upaya mereka melakukan konservasi air di gunung Mutis dan gunung Lakaan.		
Terkait Pendayagunaan SDA		
1.	Sungai Aplal (Desa Tasinifu, Naekake A, B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU, NTT)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan mengambil air karena lokasi air di dataran rendah. • Pemukiman penduduk yang terlalu dekat dengan sungai. • Penduduk desa Tasinifu maupun penduduk RDTL di distrik Oecusi kesulitan memperoleh air irigasi karena bendung Seko rusak
2.	Sungai Malibaka (Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT)	<ul style="list-style-type: none"> • Rusaknya pipa karena ukuran pipa terlalu kecil. • Rusaknya bendung Haekesak, yang menyebabkan penduduk harus menggunakan bendung manual untuk mengalirkan air ke persawahan. • Pembangunan bendung oleh RDTL di Nunura dapat mengancam penduduk desa Maumutin terhadap akses air irigasi dari sungai Malibaka
3.	Sungai Baukama (Desa Asumanu, Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air yang lebih rendah dari pemukiman, menyebabkan penduduk kesulitan mendapatkan akses air. • Membutuhkan pompa hydrant untuk mengalirkan air ke pemukiman.

No.	Lokasi	Permasalahan (perlu campu tangan negara)
	Lasiolat Kabupaten Belu, NTT)	
4.	Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, NTT	<ul style="list-style-type: none"> Keruskaan pipa air karena perbaikan jalan.
Permasalahan Terkait Pengendalian Daya Rusak Air		
1.	Sungai Aplal (Desa Tasinifu, Naekake A, B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU, NTT)	<ul style="list-style-type: none"> Jembatan rusak akibat banjir, mobilitas penduduk terganggu. Erosi/gerusan di sekitar badan sungai. Kerusakan bendung Seko di perbatasan RI (desa Tasinifu) RDTL (distrik Oecusi)
2.	Sungai Malibaka (Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT)	<ul style="list-style-type: none"> Gerausan sungai dan alur sungai yang berpindah-pindah Beberapa patok acuan batas Negara rusak
3.	Sungai Motamasin (Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, NTT)	<ul style="list-style-type: none"> Sawah menggenang dan rusak akibat banjir sungai motamasin. Rusaknya infrastruktur jembatan penghubung kedua negara akibat banjir.
Permasalahan Terkait SISDA		
Seluruh DAS Perbatasan		<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Informasi Sumber Daya Air tidak berkesinambungan. Penyebarluasan sistem informasi Sumber Daya Air belum memadai di seluruh Kabupaten Program-program yang terkait dengan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh setiap sektor belum sinkron, sinergi dan terpadu Belum adanya sistem informasi sumber daya air antara negara NKRI dan Timor Leste. Penyebarluasan sistem informasi sumber daya air belum terkoordinasi antar negara NKRI dan Timor Leste.
Permasalahan Terkait Pemberdayaan Masyarakat		
Seluruh DAS perbatasan		<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat belum terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumber Daya Air.
Permasalahan Lainnya(Non-SDA)		
Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT		<ul style="list-style-type: none"> Tidak berfungsinya tower Telkomsel, sehingga penduduk sering kena roaming, dari jaringan Timor Telekom.

6.2. Saran

Pemerintah perlu hadir untuk mengatasi berbagai persoalan pengelolaan sumber daya air, tanpa kehadiran negara masyarakat tidak maksimal bisa mengatasi permasalahan SDA. Beberapa saran yang diberikan, yang harus dilakukan negara di wilayah perbatasan NKRI-RDTL terkait dengan pengelolaan SDA, sebagai berikut :

- Penetapan kawasan DAS (terutama bagian hulu) sebagai kawasan konservasi yang harus dimuat pada RTRW dan Pola serta Rencana PSDA.
- Meningkatkan konservasi lahan secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat.
- Perlu pembangunan/perbaikan infratraktur peyediaan air bersih dan air baku bagi penduduk.
- Perbaikan jaringan irigasi.
- Pemanfaatan air untuk listrik
- Penyusunan kesepakatan/kerjasama pengelolaan sungai lintas Negara antara RI dan RDTL.
- Penyusunan dan implementasi penanganan banjir terpadu.
- Penyusunan dan implementasi penanganan abrasi.
- Pengembangan sistem peringatan dini banjir
- Permbangunan / perbaikan dan perkuatan infrastruktur perkuatan tebung sungai
- Penyusunan dan implementasi sistem informasi sumber daya air terpadu.
- Nota kesepahaman *sharing* sistem informasi antara NKRI dan RDTL.
- Perkuatan sistem dan jaringan komunikasi di daerah perbatasan.

Daftar Pustaka

- Anshori, Imam. *Kebijakan Pengelolaan SDA di Indonesia*, ISBN-979-98014-4-3, Panitia Nasional Program Hidrologi IHP-UNESCO, LIPI 2004.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [http://aghnanisme.blogspot.com/2012/10/sumber daya alam.html](http://aghnanisme.blogspot.com/2012/10/sumber%20daya%20alam.html)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/tanah>
- <http://tugino230171.wordpress.com/2011/10/29/sumber-daya-alam-dan-pemanfaatannya/>
- <http://www.imammurtaqi.com/2012/04/pemanfaatan-sumber-daya-alam.html>
- Pemerintah RI, *UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2004-2025.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.